DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Affandi. *Hukum Acara Pengadilan Agama* Cet.1 Malang Jatim: Setara Press, 2019.

Al-Qur'an terjemah Kemenag RI Offline.

Amirudin, Zainal, Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Jus IX Damaskus:Daruk Fiki, 1997.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Fauzan. *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Huku Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013

Hanifah, Ishana. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pdana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* Yogyakarta: Laksana, 2014

H.R. al-Bukhari No. 5066 dan Imam Muslim No. 1400 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu. Dikutip dari Shahih At- Targhib wa At Tarhib*, jilid 4.

Latief, Mujahid, A. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta:Universitas Atma Jaya 2010.

Muhammad, Husein *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009.*

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Proedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

Qomar,et al. Nurul Eds. *Metode Penelitian Hukum* Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

A. UNDANG-UNDANG

Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019.

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489 (2019).

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. 6401 2019.

PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11).

Pasal (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

SEMA No. 4 Tahun 1984.

A. KARYA TULIS ILMIYAH

Christina Schlatter, and Andrea Buchler *Meriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws* EJMELL. Vol. 1, 2013.

Ghansham Anand, dan Adisti Pratama Ferevaldy. *Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)* JHAPER: Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2017.

Ishaq, Maulana. Skripsi. *Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: UIN, 2016),

Wafa, Moh. Ali. *Telaah Kritis Terhadaf Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam* Ahkam. Vol. 17, No. 2, 2017.

B. INTERNET

MA RI. Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Diakses pada tanggal 27 April 2022.

C. TEMUAN

Ali Muhammad Sahli Hakim PA Marabahan, Selasa 1 Maret 2022:11.16.

Fitriyadi hakim ketua PA Marabahan, Rabu 9 Juni 2021: 14.50.

Peraturan khusus PA Marabahan.